

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori-teori yang relevan bagi pemenuhan kebutuhan analisis dalam proses penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori-teori yang tepat maka analisis dalam pendalaman penelitian akan semakin mendalam dan semakin baik. Adapun beberapa teori-teori yang digunakan diantaranya adalah :

##### **2.1.1 Teori Keamanan Nasional**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dan memiliki luas teritorial yang sangat luas yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>. Sebagai negeri kepulauan terbanyak, keamanan nasional Indonesia ialah isu berarti dalam strategi pertahanan negara. Banyaknya permasalahan keamanan yang timbul di Indonesia menuntut Indonesia harus mengambil langkah cepat dan tanggap dalam mengatasi permasalahannya. Maka dari itu, penyelenggaraan Keamanan Nasional dibutuhkan dalam membangun *resilience* serta keahlian menyesuaikan diri bangsa serta negeri Indonesia dalam mengalami bermacam ancaman-ancaman yang masuk lewat arus globalisasi (Hasanudin, 2013).

Keamanan adalah kondisi yang wajib diciptakan oleh pemerintah sebagai tanggungjawabnya di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak berhubungan dengan militer, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman juga terkait dengan keamanan wilayah negara secara fisik yang terganggu akibat adanya gangguan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana (Isabela, 2017).

Menurut *Holmes L Kirm*, Keamanan Nasional adalah upaya penjagaan nasional secara keseluruhan yang menjadi perintah tertinggi yaitu perlindungan negara dan rakyat dari serangan dan ancaman militer maupun non militer. Konsep pendekatan Keamanan nasional dapat dilakukan melalui pendekatan perilaku, pendekatan psikologi, pendekatan filosofis, pendekatan sejarah, pendekatan ilmu politik, pendekatan mitologis, pendekatan konstitusional dan pendekatan militer (Chailand, et al., 1992).

Keamanan Nasional dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai kondisi dan sebagai fungsi. Sebagai kondisi maka keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi yang bersifat menyeluruh dan menjelaskan terbebasnya rakyat dan negara dari segala corak ancaman baik yang dipengaruhi komponen internal dan eksternal. Sedangkan selaku fungsi menggambarkan fungsi negara di dalam menyampaikan keamanan bagi negara dan warganya (Darmono, et al., 2010).

Kesiapan masyarakat merupakan kondisi aman insani, hal ini memberi makna bahwa keamanan secara nasional hanya bisa tercapai jika keamanan secara individual telah terpenuhi. Keamanan tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang terpisah dari pembangunan, di mana kedua fenomena ini saling menguatkan dalam mencapai tujuan nasional dan dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Pendekatan Keamanan Nasional UNDP berasal dari *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1994 menjelaskan bahwa konsep keamanan insani di bagi dua terkait ancaman dan keamanan yakni *freedom from fear* dan *freedom from want*. Dalam perkembangan selanjutnya, dua konsep besar ini diturunkan menjadi 7 elemen utama dari keamanan insani . Secara umum, keamanan insani meliputi 7 bidang utama yakni: *Economic Security; Food Security; Health Security; Environmental Security; Personal Security; Community Security dan Political Security*. Ketujuh bidang inilah yang selanjutnya dapat menciptakan rasa aman bagi individu. Jika ketujuh aspek keamanan ini telah terpenuhi, barulah seorang individu dapat dikatakan aman, baik dari *freedom fromfear* maupun *freedom from want* (UNDP, 1994).

Dalam upaya pencegahan ancaman yang terjadi di Indonesia, posisi militer sangat penting untuk dirumuskan dalam sistem pertahanan Negara, Karena militer merupakan institusi legal dalam Negara yang memiliki kekuatan nyata. Militer Indonesia merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menggunakan kekuatan, termasuk menggunakan senjata dalam mempertahankan stabilitas keamanan dalam negerinya. (Santoso, 2008).

### **2.1.2 Teori Bencana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24, 2007).

Menurut UNISDR Bencana di definisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian yang meluas pad kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (UNISDR,2009).

Menurut United Nation International Strategy fro Disaster Reduction (UN/ISDR, 2002) terdapat dua jenis utama bencana diantaranya adalah bencana alam dan bencana teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga jenis yaitu : (1) Bencana *Hydrometeorological*, berupa banjir, topan, banjir bandang, kekeringan dan tanah longsor; (2) Bencana *Geophysical* yaitu gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik; (3) Bencana *Biological* yaitu epidemic, penyakit tanaman dan hewan. Bencana teknologi terbagi dua yaitu : (1) Kecelakaan industry, diantaranya kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi; (2) Kecelakaan transportasi diataranya adalah kecelakaan udara, *rail*, jalan dan

transportasi air; (3) Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestic atau non industrial, ledakan dan kebakaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 terdapat 3 (tiga jenis) bencana, yaitu bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Pada tahap prabencana meliputi yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi : (a). Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; (b). Penentuan status keadaan darurat; (c). Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (d). Pemenuhan kebutuhan dasar; (e). Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan (f). Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi (PP Nomor 21, 2008).

Manajemen Risiko bencana menurut *Asian Disaster Reduction and Respon Network (ADRRN)* adalah proses sistematis dalam menggunakan peraturan administratif, lembaga, dan keterampilan serta kapasitas operasional untuk melaksanakan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan dan kapasitas bertahan yang lebih baik untuk mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya dan kemungkinan bencana. Istilah ini

merupakan perluasan dari istilah manajemen Risiko yang lebih luas untuk mencakup isu-isu khusus tentang Risiko bencana.

Pengelolaan dalam Risiko Bencana merupakan langkah-langkah formal suatu faktor risiko yang diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani dengan terencana supaya kelemahan dan kerusakan dapat diminimalisir melalui tindakan-tindakan penanganan risiko yang dilakukan melalui langkah-langkah : (a) Menghindari (*avoiding*) penyebab-penyebab ancaman misalnya tidak membuat bangunan di wilayah yang rentan terhadap banjir; (b) Merubah/memodifikasi ancaman misalnya membuat hujan buatan guna antisipasi terhadap bencana kekeringan; (c) Memindahkan (*averting*) lokasi risiko dari khalayak yang rentan misalnya membuat sempadan badan sungai, sabo dam yang digunakan guna penahan dan mengalirkan aliran lahar; (d) Beradaptasi (*adapting*) kepada bahaya misalnya pembuatan regulasi untuk gedung tahan gempa; (e) Distribusi ancaman untuk pihak lain misalnya melalui asuransi bencana.

Pendalaman terhadap ancaman bencana adalah upaya guna menggambarkan potensi akibat negatif yang akan terjadi bila risiko bencana tinggi. Potensi akibat negatif dapat dikalkulasi dengan menggunakan jenjang kerentanan dan kapasitas risiko bencana tersebut. Potensi akibat negatif menjelaskan bahwa ancaman jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan dampak rusaknya lingkungan yang terdampak oleh potensi ancaman. Pada implementasinya, Pengkajian Risiko bencana secara umum dirumuskan yaitu :  $\text{Risiko bencana} = (\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}) / \text{Capacity}$ .

Pada pengkajian risiko bencana, pendekatan unsur dari berbagai parameter pembentuk risiko, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam bencana. Beberapa prinsip penting pada pengkajian risiko bencana yang menjadi tolak ukur proses pendalaman diantaranya ; (1) Menggunakan data dan keseluruhan rekaman peristiwa yang terjadi, dengan memprioritaskan data valid dari institusi yang kompeten; (2) Melakukan integrasi kajian kemungkinan peristiwa risiko bencana dari para pakar dengan kearifan lokal masyarakat; (3) Prosedur analisis yang dilaksanakan wajib mampu mengkalkulasi jumlah korban jiwa, kerugian

harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terdampak; (4) Hasil pendalaman risiko akan diterjemahkan menjadi kebijakan menyeluruh guna pengurangan risiko bencana (Widana, 2019).

### 2.1.3 Teori Kapasitas dan Organisasi

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan seseorang maupun organisasi atau elemen didalamnya guna menggambarkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Berdasarkan pendapat dari Hinderbrand dan Grindle di gambarkan bahwa *Capacity* adalah “*The ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainability*” (Kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi dengan efektif, efisien dan berkesinambungan).

Komponen-komponen yang ada pada Kapasitas berdasarkan pendapat Loubser pada kutipan dari Blageschu dan Young diantaranya adalah : *Specified objective* (Sasaran yang spesifik), *Effort* (Usaha dan Upaya), *Capabilities* (Kapabilitas), *Resources* ( Sumber Daya), serta *Work Organisation* (Perencanaan Kerja). Berdasarkan pernyataan dari Millen yang menyebutkan bahwa Kapasitas yaitu Kemampuan seseorang, lembaga, atau sistem guna menajalankan fungsi dengan efisien, efektif dan konsisten. Lebih lanjut Millen Mengartikan Kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi sumber daya dan Keadaan yang memberikan kesempatan seseorang, lembaga, jaringan kerja dan sistem yang lebih luas guna melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan menggapai tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dari masa ke masa” (Millen A, 2006).

Ada tiga jenjang dalam upaya pengembangan Kapasitas yang digambarkan oleh Millen yang menjadi sasaran utama pendalaman dan prosedur perubahan suatu lembaga, diantaranya ; (1) Tingkatan sistem/kebijakan; (2) Tingkatan Organisasi/Lembaga; (3) Tingkatan individu/Sumber Daya Manusia. Menurut *Grindle* (1997) dalam jurnal *Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia, 2014*

menjelaskan pengembangan kapasitas organisasi dalam bidang pemerintahan yaitu rangkaian prosedur yang bertujuan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu lembaga. Menurut pendapat *Grindle*, dalam mengukur kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari tiga elemen. Tiga elemen tersebut yaitu pengembangan sumber daya manusia (HRD), memperkuat organisasi serta reformasi kelembagaan (*Grindle*, 1997).

Adapun matriks dimensi kapasitas kelembagaan menurut *Grindle* disajikan pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Dimensions and Fokus Of Capacity-Building Initiatives**

<b>Dimension</b>	<b>Fokus</b>	<b>Types Of Activities</b>
<i>Human Resource Development</i>	<i>Supply of professional and technical personal</i>	<i>cruitment, Condition of work, re</i>
<i>Organizational Strengthening</i>	<i>Management sistem to improve performance of specific task and functions;microstructures</i>	<i>Incentive system, utilization of personel, leadership, organizational culture, communication, managerial structures</i>
<i>Institutional Reform</i>	<i>Institutions and sytems;macrostructure</i>	<i>Policy and legal change, constitutional reform</i>

Sumber : *European Journal Of Reseach in social sciences*, 2014,

Menurut tabel diatas, untuk menghitung kapasitas pengembangan organisasi dapat melakukan proses intervensi mulai dari intervensi terhadap sumber daya manusia secara sistematis yang terdiri dari upaya ppendidikan, perbaikan situasi tugas, dan seleksi yang baik dan terpadu. Pada sudut pandang penguatan kelembagaan terpadu terdiri dari sistem insentif, penggunaan personil, *leadership*, budaya kelembagaan, komunikasi, dan struktur manajer terpadu. Kemudian dalam sudut pandang pembaharuan organisasi yang terintegrasi melingkupi sistem organisasi, dan struktur makro kelembagaan. Matriks tersebut menjelaskan bahwa

dalam optimalisasi kapasitas organisasi, tiga elemen tersebut memegang peranan penting serta ketiga dimensi tersebut harus diupayakan dapat berjalan secara terpadu dalam suatu lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi yang mampu meningkatkan kapasitasnya dalam merespon setiap perubahan yang ada (Kasmad, 2014).

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani *Organon* dan Bahasa Latin *Organum* yang berarti alat, bagian atau badan. Dalam pengertian lain organisasi berasal dari *organizare* yang berarti mengatur atau menyusun, dalam Bahasa Inggris *Organization* yang berarti hal yang mengatur dan kata kerjanya *organizing* berasal dari Bahasa Latin *organizare* yang berarti mengatur atau menyusun. Secara Umum organisasi sering diartikan sebagai kumpulan orang dengan cara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Ach. Mohyi, 1999). Definisi lain yang lebih komprehensif menurut Stephen F. Robbins, organisasi adalah suatu entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang diidentifikasi secara relatif yang berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama (Zazin, 2018).

Secara garis besar, terdapat beberapa bentuk organisasi berdasarkan struktur yang sudah biasa digunakan, diantaranya : (1) Organisasi Lini ; Banyak dikenal dengan organisasi garis, bentuk organisasi ini secara struktur sangatlah tradisional dan sederhana. Susunan struktur sangatlah sederhana, tegas dan mudah dipahami sistemnya. Organisasi lini banyak digunakan oleh organisasi kecil/organisasi yang jumlah anggotanya sedikit. Disebut organisasi lini/organisasi garis karena strukturnya seperti membentuk sebuah garis (garis Komando/Garis Koordinasi, contohnya Organisasi TNI); (2) Organisasi Lini dan Staf ; Bentuk organisasi ini masih sama saja dengan organisasi lini, namun ada penambahan staf didalamnya. Alasan penambahan staf ini adalah untuk membantu pekerjaan struktur inti organisasi dalam bidang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Terdapat dua pihak yang berperan, pihak pertama yaitu anggota inti organisasi, sedangkan pihak kedua yaitu tenaga teknis/staf. Anggota inti organisasi adalah orang yang memegang jabatan struktural, sedangkan staf adalah orang yang jabatannya berdasarkan keahlian yang

dibutuhkan organisasi, contohnya organisasi kelurahan/Desa;(3) Organisasi Fungsional ; Bentuk organisasi yang secara struktur dibuat terpisah dari struktur kepemimpinan inti sebuah organisasi. Fungsinya adalah untuk menjalankan tugas-tugas teknis yang berskala besar. Bentuk organisasi seperti ini biasanya terdapat dalam organisasi yang pembagian tugasnya banyak, contohnya Universitas/Perusahaan menengah keatas;

(4) Organisasi *Ad hoc* : Bentuk organisasi yang bersifat momentum dan hanya menjalankan tugas khusus saja. Jika tugas khusus tersebut sudah selesai dilakukan, maka bisa saja organisasi ini dibubarkan. Artinya organisasi *ad hoc* ini dibentuk hanya untuk menjalankan kegiatan yang telah ditentukan saja. Organisasi *ad hoc* terbagi dalam dua bentuk, pertama bentuk komite dan kedua bentuk panitia. Bentuk Komite artinya organisasi ini berjalan secara kolektif kolegial. Semua anggota memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk menghasilkan keputusan. Bentuk panitia artinya organisasi ini dibentuk secara lini, memiliki pembagian kerja yang sesuai dengan tugas khusus yang akan dilaksanakan. Bentuk organisasi *ad hoc* ini biasanya merupakan struktur terpisah dari organisasi inti. Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, terdapat beberapa Negara yang bersifat *ad hoc*, contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain sebagainya. Terdapat lebih dari 20 lembaga yang berbentuk *ad hoc* dan bersifat independen dalam pemerintahan Indonesia. Lembaga *ad hoc* tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Negara dan sewaktu-waktu bisa dibubarkan jika tidak dibutuhkan lagi (Manua, 2018).

Berdasarkan argumentasi ahli-ahli tersebut, definisi kapasitas dan organisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kemampuan dan kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilihat dari kondisi kapasitas Organisasi/Kelembagaan, Sarana prasarana, personel (SDM), dan regulasi dalam melaksanakan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana. Secara lebih khusus terkait dengan Kapasitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang menggambarkan Kapasitas Institusi/Lembaga Pemerintah, Sipil maupun Militer dalam upaya Penanggulangan Bencana di beberapa lokasi di Indonesia. Dibawah ini adalah hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Sanjaya, R.N. (2018), yang berjudul Kapabilitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) Yonzipur10/2 Komando Strategis (Kostrad) terhadap Penanggulnagan Bencana Banjir Bandang di Bima NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu *Research* untuk tujuan mempelajari kondisi yang dialami oleh subjek manusia diantaranya perilaku,pandangan,motivasi, dan lainnya secara menyeluruh, yang disampaikan dalam bentuk pernyataan dan Bahasa secara akademik dengan memanfaatkan prosedur akademik. Subjek *Reseach* ini yaitu narasumber yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Narasumber tersebut diantaranya : (a) Danyon/Wadanyonzipur 10/2 Kostrad; (b) Pasi 2/Operasi Yonzipur 10/2; (c) Pasi 3/Personil Yonzipur 10/2 Kostrad; (d) Pasi 4/Logistik Yonzipur 10/2; (e) Danki Bantuan Yonzipur 10/2 Kostrad; (f) Danton, Bintara, dan Tamtama Yonzipur Kostrad 10/2 Kostrad. Hasil *Research* memperlihatkan bahwa Kapasitas SDM Batalyon Zeni tempur 10/2 pada pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana Alam sekarang ini perlu untuk ditingkatkan, hal tersebut disebabkan karena kewajiban pokok dari Yonzipur 10/2 Kostrad bukan merupakan satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), namun sebagai Satuan bantuan tempur ( Sanjaya, 2018).
- b. Patria, R.N. (2013), yang berjudul Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Studi Kasus : Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur dalam Penanggulangan Banjir. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan agar lebih memahami, dan ikut terjun dalam penanganan

- bencana banjir. Hasil penelitian ini Pengalaman bisa pengaruhi penyiapan kapasitas organisasi dalam melakukan tugas. Peran TNI yang belum fokus serta tidak terdapatnya standarisasi keahlian hendak mempengaruhi kapasitas sesuatu organisasi (Patria, 2018).
- c. Dulkadir (2016), yang berjudul Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah, Studi di Kodim 0614 Kota Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Tata cara riset kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi primer lewat wawancara mendalam, observasi, riset dokumentasi, serta informasi sekunder dari kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kodim 0614 dalam melaksanakan tugas Penanggulangan musibah banjir hadapi kendala-kendala sehingga kurang maksimal. Hambatan tersebut ialah kelembagaan penanggulangan musibah, implementasi kebijakan, komando pengendalian, sumber energi manusia, fasilitas prasarana serta anggaran. Kodim 0614 mencari strategi dalam menanggulangi kendala- kendala tersebut supaya dalam penerapan tugas Penanggulangan musibah banjir bisa dilaksanakan dengan maksimal (Dulkadir, 2016).
- d. Widyaningrum, N., Kodar, M.S, Purwanto, R.S. & Priambodo, A (2020), yang berjudul Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dari *Reseach* ini yaitu pelibatan TNI dalam prosedur penanggulangan bencana tidak bersifat pragmatis, tapi perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Tugas Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan bencana alam di Provinsi Lampung telah ditunaikan sesuai dengan pengelolaan bencana dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah mulai dari proses Pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana (Widyaningrum et al., 2020).
- e. Wahyudi, Y., Prasetyo, T.B. & Bonar, T. (2017), yang berjudul Sinergi Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah dalam

Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus di Kodim 0609/ Kabupaten Bandung). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksploratif oleh sebab capaian *research* tersebut ingin memahami level permasalahan koordinasi satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam upaya antisipasi bencana alam longsor, dimana dalam penelitian dapat menyajikan informasi secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama antara Kodim 0609/Kabupaten Bandung dengan Otoritas wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Bencana Alam tanah longsor belum terlaksana secara mumuni. Dilihat dalam perspektif sinergitas, kerjasama antara Kodim 0609/ Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan bencana alam tanah longsor sudah berjalan dengan baik khususnya pada tahap tanggap darurat (Wahyudi et al., 2017).

Dari kelima penelitian yang diuraikan tersebut, terdapat kesamaan dan perbedaan antara satu dengan lainnya. Kesamaan yang ditemukan adalah substansi penelitian terkait dengan Institusi militer yang melaksanakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu Penanggulangan Bencana, sedangkan perbedaan yang ditemukan terkait dengan belum adanya penelitian yang membahas secara khusus tentang PRCPB TNI dalam lingkup Nasional secara mendalam dan komprehensif. Guna mempermudah dalam memahami substansi kelima penelitian tersebut, dapat peneliti uraikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Yanfri Satria Sanjaya (2018)	Kapabilitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) Yonzipur 10/2 Kostrad terhadap Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang di Bima NTB	Kapasitas SDM Satuan Batalyon Zeni Tempur 10/2 dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana alam sekarang ini masih harus ditingkatkan, oleh karena dalam kewajiban pokok dari Yonzipur 10/2 Kostrad sendiri tidak lain sebagai Satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) namun untuk Satuan bantuan Tempur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis institusi TNI dalam operasi Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian berada di wilayah NTB</li> <li>• Ruang lingkup penelitian lebih sempit</li> <li>• Pembahasan substansi penelitian lebih spesifik di tingkat operasional</li> </ul>
2	Reza Nur Patria (2013)	Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Studi Kasus : Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur dalam Penanggulangan Banjir	Apa yang telah dilaksanakan bisa berpengaruh pada persiapan kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas. Tugas TNI yang belum fokus dan tidak terdapat standar kapasitas akan mempengaruhi kapasitas suatu lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis Kapasitas lembaga militer dalam tugas operasi Penanggulangan bencana di wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penekanan pada salah satu aspek kapasitas dalam focus analisisnya</li> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Ruang lingkup penelitian lebih sempit</li> <li>• Jenis bencana lebih fokus</li> </ul>
3	Dulkadir (2016)	Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Implikasinya	Kodim 0614 pada pelaksanaan operasi Penanggulangan bencana banjir menghadapi berbagai tantangan sehingga kurang optimal. Tantangan tersebut yaitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis lembaga militer dalam operasi Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus analisis kepada peran lembaga militer dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul>

		terhadap Ketahanan Wilayah, Studi di Kodim 0614 Kota Cirebon, Jawa Barat	kelembagaan penanggulangan bencana, implementasi kebijakan, komando pengendalian, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Kodim 0614 mencari strategi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut agar dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan dengan optimal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Desain penelitian</li> <li>• Substansi penelitian lebih spesifik</li> </ul>
4	Nrangwesthi Widyaningrum (2020)	Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung	Keterlibatan TNI dalam proses penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, namun bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan bencana alam di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan manajemen bencana dengan memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah mulai dari proses Pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis lembaga militer dalam operasi Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian pada peran lembaga militer dalam Penanggulangan Bencana</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Ruang lingkup penelitian</li> <li>• Desain penelitian</li> </ul>
5	Yoyok Wahyudi (2017)	Kerjasama Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan	Kerjasama antara Kodim 0609/Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Bencana Alam tanah longsor belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis lembaga militer dalam operasi Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian pada aspek sinergitas antar lembaga sipil dan lembaga militer dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul>

		Bencana Alam (Studi Kasus di Kodim 0609/ Kabupaten Bandung)	Dipandang dalam perspektif sinergitas, kerjasama antara Kodim 0609/ Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan bencana alam tanah longsor cukup optimal special dalam jenjang tanggap darurat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Desain penelitian</li> <li>• Ruang lingkup substansi penelitian</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Diolah Peneliti, 2021.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

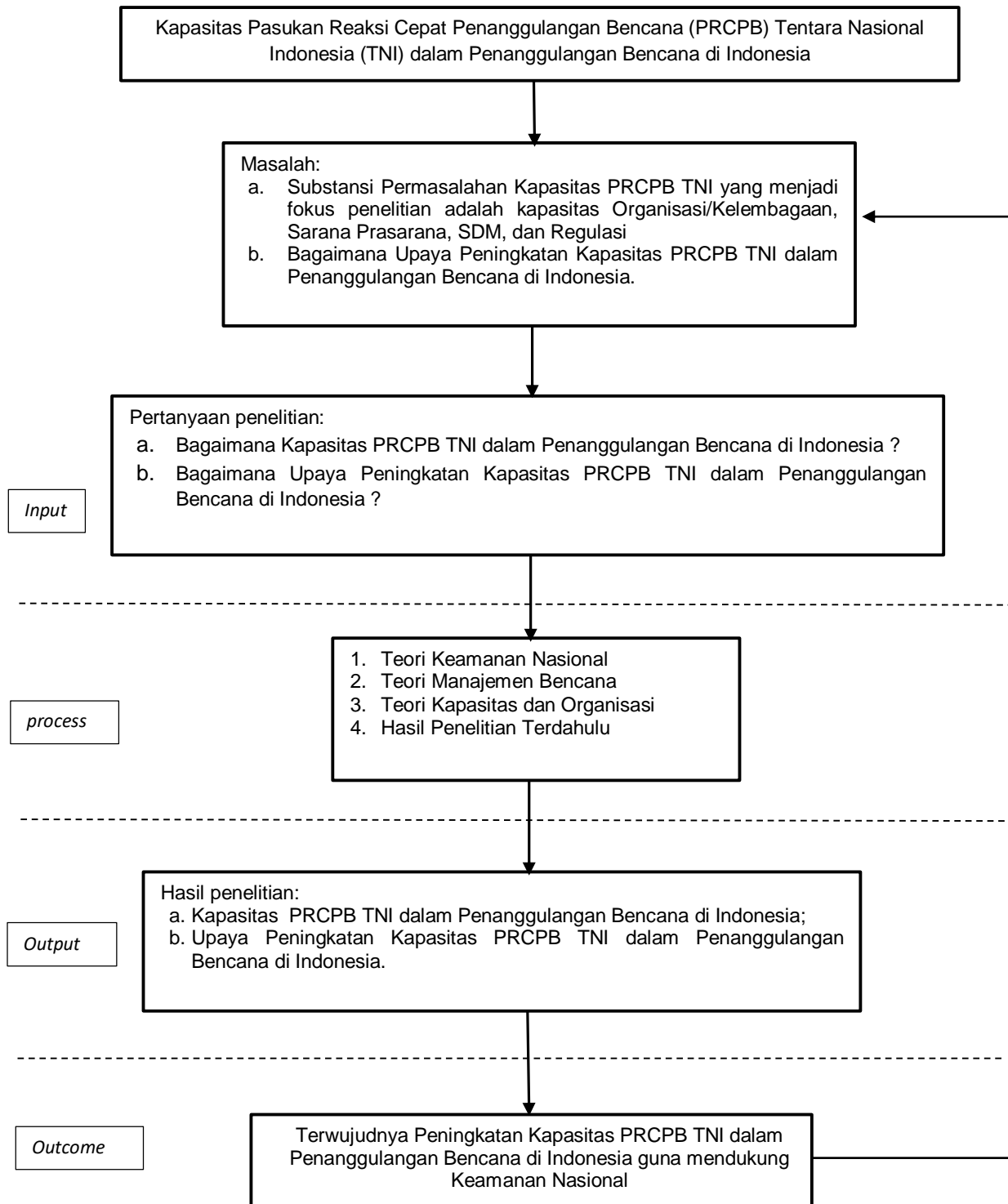
Pada proses penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran dengan membuat simulasi analisis yang dapat menggambarkan alur pemikiran pada proses penelitian. Dimulai dengan bagaimana *input* penelitian dianalisis menggunakan teknik tertentu dan disinkronisasi dengan menggunakan beberapa teori, kemudian menjadi hasil penelitian yang berkualitas yang terwujud dalam *outcome* penelitian.

Fokus pendalaman penelitian yang akan dibahas tentang Kapasitas PRCPB TNI dan bagaimana Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan Desain, Teknik dan Metode penelitian tertentu. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data dengan metode penelitian kualitatif dan desain penelitian deskriptif pada tataran analisis secara eksploratif.

Dengan pendalaman yang menggunakan metode penelitian kualitatif maka *output* yang akan dihasilkan dapat menggambarkan secara berkualitas dan mendalam tentang Kapasitas dan Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

*Outcome* yang diharapkan akan dapat diwujudkan dengan proses analisis dan teknik analisis penelitian secara sistematis dan objektif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi seluruh Komponen bangsa sebagai representasi dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Untuk mempermudah dalam memahami alur proses pemikiran penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran yang memuat sistematika dan proses penelitian secara komprehensif dan sistematis. Kerangka pemikiran dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah Peneliti, 2021.